



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Pelita No. 1, Pasiran, Singkawang Barat – 79123

Telepon: (0562)-635727 Faksimile (0562) 635727

Laman : singkawangkota.go.id, Pos-el bappedakotaskw@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SINGKAWANG

NOMOR 100.3.3.6/ 37 /BAPPEDA.SET-A TAHUN 2025

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang ;
 - b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Daftar Informasi Publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indionesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 118 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang
13. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar informasi publik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
- KEDUA : Penetapan daftar informasi publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan kepentingan umum;

- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib disediakan dan diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KEEMPAT : Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang – undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 2 Juni 2025

a.n. Wali Kota Singkawang



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KOTA SINGKAWANG SELAKU
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 PELAKSANA
 NOMOR 100.3.3.6/ 37/BAPPEDA.SET-A TAHUN 2025
 TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK
 TANGGAL 2 JUNI TAHUN 2025

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Ringkasan Isi Informasi		Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD)	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan Informasi
					Soft Copy	Hard Copy	
A	Informasi Yang Berkaitan Dengan Badan Publik						
	Mengumumkan informasi berupa deskripsi tentang nama, alamat, struktur organisasi, tugas, fungsi dan kewenangan berdasarkan ketetapan dan peraturan yang berlaku dan disediakan melalui website Badan Publik dan PPID						
1	a	Profil Pemerintah Kota Singkawang	BAPPEDA	2023-2024	✓	✓	
	b	Profil Badan Publik	PPID Pelaksana	2023-2024	✓	✓	
	Mengumumkan informasi LHKPN Pejabat Daerah yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh KPK untuk disediakan / diumumkan pada website Badan Publik dan PPID (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari:						
	d	Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan Badan Publik	PPID Pelaksana	2023-2024	✓	✓	

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD)	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan Informasi
				Soft Copy	Hard Copy	
e	Mengumumkan informasi jumlah dan prosentase yang wajib LHKSN dalam lingkup Badan Publik (bukan website KPK)	PPID Pelaksana	2023-2024	✓	✓	
B	Informasi tentang program dan/atau kegiatan Badan Publik yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi					
1	Mengumumkan program atau kegiatan (DPA) melalui website Badan Publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, sumber anggaran, besaran anggaran.	PPID Pelaksana	2024	✓	✓	
2	Mengumumkan program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan (Evaluasi RENJA) melalui website Badan Publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan	PPID Pelaksana	2023-2024	✓	✓	
3	Mengumumkan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan (LAKIP) melalui website Badan Publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program/kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan	PPID Pelaksana	2023-2024	✓	✓	
4	Rencana Strategik Badan Publik	PPID Pelaksana	2024	✓	✓	
C	Laporan Keuangan					
	Mengumumkan dalam website Badan Publik dan PPID informasi Laporan Keuangan yang telah diaudit yang terdiri dari :					
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	PPID Pelaksana	2023	✓	✓	
2	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	PPID Pelaksana	2023	✓	✓	
3	Daftar Aset dan Investaris	PPID Pelaksana	2023-2024	✓	✓	

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD)	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan Informasi
				Soft Copy	Hard Copy	
4	Neraca	PPID Pelaksana	2023	✓	✓	
6	LKPD	PPID Pelaksana	2023-2024	✓	✓	
10	Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	BAPPEDA	2023-2024	✓	✓	
11	Ringkasan RKA OPD	PPID Pelaksana	2024	✓	✓	
12	Ringkasan DPA OPD	PPID Pelaksana	2024	✓	✓	
15	Informasi realisasi atau penyerapan anggaran (RFK)	PPID Pelaksana	2023-2024	✓	✓	
D	Pengadaan Barang dan Jasa					
1	Mengumumkan informasi rencana umum pengadaan program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Publik sebagaimana tercantum dalam SIRUP	PPID Pelaksana / BAG.PBJ	2023-2024	✓	✓	
2	Mengumumkan Lima (5) Paket pengadaan barang dan jasa tertinggi berkaitan program atau kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur dengan nilai tertinggi sebagaimana tercantum dalam LPSE yang telah selesai serah terima	PPID Pelaksana / BAG.PBJ	2023-2024	✓	✓	
3	Mengumumkan Lima (5) Paket pengadaan barang dan jasa tertinggi berkaitan program atau kegiatan infrastruktur dan non infrastruktur dengan nilai tertinggi sebagaimana tercantum dalam LPSE yang masih berjalan dan belum serah terima	PPID Pelaksana / BAG.PBJ	2023-2024	✓	✓	
E	Informasi Terbuka Lainnya					
	Mengumumkan Ringkasan Tentang Laporan Akses Informasi Publik (Laporan PPID) yang memuat tentang:					

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD)	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan Informasi
				Soft Copy	Hard Copy	
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima	PPID Pelaksana	2024	✓	✓	
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	PPID Pelaksana	2024	✓	✓	
3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	PPID Pelaksana	2024	✓	✓	
4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasan penolakan Permintaan Informasi Publik	PPID Pelaksana	2024	✓	✓	
	Mengumumkan Prosedur Pelayanan Akses Informasi Publik yang dapat disediakan berupa Poster/Pengumuman/Infografis					
5	Tata cara memperoleh informasi publik disertai informasi waktu dan syarat permohonan	PPID Pelaksana	2024	✓	✓	
6	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggung jawab	PPID Pelaksana	2024	✓	✓	
7	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik	PPID Pelaksana	2024	✓	✓	
8	Tata cara atau prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	PPID Pelaksana	2024	✓	✓	

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SETIAP SAAT

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD)	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan Informasi
				Soft Copy	Hard Copy	
A	Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan					
1	Profil pegawai mengenai nama, karir, pendidikan, penghargaan (DUK)	PPID Pelaksana	2024	✓	✓	
2	Data statistik sektoral yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik	PPID Pelaksana	2023-2024	✓	✓	
3	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diberlakukan oleh Badan Publik	PPID Pelaksana	2024	✓	✓	
B	Informasi peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik					
1	Daftar rancangan dan tahap perumusan bagi peraturan, keputusan, dan/atau ketetapan yang sedang dalam proses pembuatan	PPID Pelaksana	2024	✓	✓	
2	Daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	PPID Pelaksana	2023-2024	✓	✓	
C	Informasi Setiap Saat Lainnya					

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD)	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan Informasi
				Soft Copy	Hard Copy	
	Menyediakan dokumen Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya					
1	Daftar Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerja Sama sesuai tugas dan fungsi Badan Publik	PPID Pelaksana	2023-2024	✓	✓	



INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung Jawab Informasi (Pejabat/Unit/OPD)	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan Informasi
				Soft Copy	Hard Copy	
A	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum					
1	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.	PPID Pelaksana	2023-2024	✓	✓	